

ABSTRAK

Hak atas upah merupakan hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun kondisi perumahan pekerja tanpa kejelasan terkait upah sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum atas hak upah bagi pekerja yang dirumahkan oleh pemberi kerja dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan perlindungan hukum hak atas upah bagi pekerja yang dirumahkan oleh pemberi kerja, mengetahui implikasi pemberi kerja yang tidak membayarkan upah bagi pekerja yang dirumahkan oleh pemberi kerja, serta menganalisis putusan hakim dalam putusan PN Semarang Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Merupakan suatu metode penelitian yang berfokus pada studi hukum yang berlaku, baik dari sisi teori maupun penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam kasus konkret. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perlindungan hak atas upah pekerja yang dirumahkan dengan menganalisis kasus-kasus hukum yang telah terjadi dan diputuskan oleh pengadilan, terutama yang terkait dengan perselisihan upah pekerja yang dirumahkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, peraturan terkait upah bagi pekerja yang dirumahkan belum diatur secara spesifik dalam regulasi yang ada, sehingga implementasi perlindungan upah dalam situasi ini sangat bergantung pada perundingan bipartit antara pekerja dan pemberi kerja serta kebijakan internal perusahaan. *Kedua*, implikasi dari pemberi kerja yang tidak membayarkan upah bagi pekerja yang dirumahkan dapat menimbulkan adanya perselisihan dalam hubungan kerja. *Ketiga*, putusan pengadilan dalam beberapa kasus serupa mengindikasikan bahwa pekerja tetap berhak atas upah selama masa dirumahkan, karena hubungan kerja tetap berjalan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya revisi regulasi yang lebih spesifik terkait upah pekerja yang dirumahkan guna memperkuat kepastian hukum dan melindungi hak-hak pekerja.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak atas Upah, Pekerja yang Dirumahkan, Ketenagakerjaan

ABSTRACT

The right to wages is a fundamental right guaranteed by Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. However, the placement of workers on furlough without clear arrangements regarding wages often creates legal uncertainty. This study aims to analyze the legal protection of wage rights for furloughed workers within the Indonesian labor law system. Specifically, it seeks to explain the legal protection framework for wage rights of furloughed workers, examine the implications of employers failing to pay wages during furlough, and analyze judicial considerations in the decision of the Semarang District Court Case Number 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg.

This research adopts a normative juridical method with statutory and case approaches. It focuses on the study of prevailing laws from both theoretical and practical perspectives. The study analyzes legal norms in labor regulations and their application in actual cases. This approach aims to examine relevant legislation concerning the protection of wage rights for furloughed workers by analyzing legal cases that have been adjudicated, particularly those involving wage disputes of furloughed workers.

The results show that, First, wage regulations for furloughed workers are not specifically regulated in existing laws, making the implementation of wage protection in such situations heavily dependent on bipartite negotiations between workers and employers, as well as internal company policies. Second, the employer's failure to pay wages during furlough can lead to employment disputes. Third, court rulings in similar cases indicate that workers remain entitled to wages during furlough, as the employment relationship continues to exist. This study emphasizes the need for more specific regulatory revisions regarding wages for furloughed workers to strengthen legal certainty and protect workers' rights.

Keywords: Legal Protection, Right to Wages, Furloughed Workers, Labor Law